

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.1.1 Kemitraan dalam Pengembangan Desa Wisata Limbasari

Kemitraan dalam pengembangan Desa Wisata Limbasari telah melibatkan beberapa pihak seperti Pokdarwis, pemerintah desa, Dinporapar, dan masyarakat. Dalam temuan di lapangan diketahui bahwa di Limbasari terdapat BUMDes yang sudah terbentuk dari tahun 2020 namun baru berbadan hukum di tahun 2023. Pelibatangnya dalam pengelolaan desa wisata belum terjalin secara langsung karena belum ada kesepakatan kerja sama secara formal.

Berdasarkan wawancara di lapangan, diketahui bahwa terdapat kesamaan tujuan dari pihak-pihak yang terlibat, yaitu menghidupkan kembali desa wisata limbasari *pasca* penurunan akibat pandemi serta berupaya bersama untuk mengembangkan kembali kegiatan wisatanya agar mampu memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat setempat. Tiap pihak telah menunjukkan komitmennya dalam bentuk yang berbeda sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, mulai dari keterlibatan dalam kegiatan wisata dan forum-forum desa, serta pembagian peran dalam pengelolaan potensi wisata yang ada.

Pokdarwis dan pemerintah desa memiliki hubungan kemitraan yang relatif seimbang, namun peran BUMDes belum berjalan karena

belum terlibat secara langsung. Pokdarwis berperan sebagai pengelola utama kegiatan wisata, sementara pemerintah desa mendukung dari sisi kebijakan dan fasilitasi administrasi. Sementara BUMDes baru menunjukkan kesiapannya untuk terlibat langsung jika kerja sama formal telah terbentuk, sedangkan masyarakat berpartisipasi melalui keterlibatan dalam unit usaha kecil yang seiring dengan perkembangan wisata. Di sisi lain, Dinporapar sebagai pihak dari pemerintah daerah perannya hampir sama dengan pemerintah desa, yaitu sebagai fasilitator bagi perwakilan desa wisata dan pokdarwis se-Purbalingga.

Apabila dianalisis berdasarkan teori kemitraan menurut Huxham & Vangen, kemitraan Desa Wisata Limbasari telah memenuhi sebagian indikator dasar, meskipun belum secara optimal. Dari aspek *common aim*, semua pihak memiliki tujuan bersama yang jelas. Dalam *sharing power*, terdapat pembagian peran antara Pokdarwis dan pemerintah desa, namun belum melibatkan masyarakat dan BUMDes secara setara. Mekanisme *compromise* sudah diterapkan dalam penyelesaian masalah secara musyawarah, meskipun belum terbangun sistem khusus untuk mengelola konflik. Pola *communication* antar pihak masih bersifat informal dan tidak terstruktur, sementara *determination commitment* tampak dari Pokdarwis dan pemerintah desa, namun belum merata ke semua aktor.

Dengan demikian, kemitraan dalam pengembangan Desa Wisata Limbasari telah menunjukkan arah positif, tetapi belum mencerminkan

kemitraan yang ideal sesuai indikator teori Huxham & Vangen. Masih terdapat kendala dalam aspek komunikasi, pembagian peran, keterlibatan masyarakat, dan integrasi peran BUMDes. Namun, dengan komitmen yang telah ada, kemitraan ini memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi kolaborasi yang lebih kuat apabila koordinasi, pelibatan, dan sistem kelembagaan diperkuat secara menyeluruh dan berkelanjutan.

4.1.2 Faktor Pendorong Kemitraan Dalam Pengembangan Desa Wisata Limbasari

Berdasarkan prinsip kemitraan menurut Notoatmodjo, keberhasilan kemitraan dalam pengembangan Desa Wisata Limbasari dapat dilihat dari:

1) Kesetaraan (*Equity*)

Pokdarwis dan pemerintah desa memiliki hubungan yang relatif seimbang dalam peran dan tanggung jawab. Namun, keterlibatan masyarakat belum sepenuhnya merata, serta BUMDes merasa belum menjadi bagian prioritas.

2) Transparansi

Terdapat upaya dari beberapa pihak untuk terbuka, seperti melalui laporan internal dan forum musyawarah. Namun belum ada sistem penyampaian informasi yang tetap dan merata, sehingga transparansi masih parsial.

3) Saling Menguntungkan (Mutual Benefit)

Manfaat kemitraan telah dirasakan oleh sebagian besar pihak, terutama Pokdarwis, masyarakat (melalui UMKM dan penyewaan lahan), dan pemerintah desa (melalui PADes). BUMDes belum merasakan manfaat karena belum terlibat secara langsung, namun telah menyatakan komitmennya untuk turut serta dalam pengelolaan wisata ke depan.

4.1.3 Faktor Penghambat Kemitraan

Beberapa faktor yang menghambat kemitraan antar *stakeholder* dalam pengembangan Desa Wisata Limbasari antara lain:

- 1) Kurangnya pelibatan aktif masyarakat, yang menyebabkan sebagian warga merasa tidak tahu-menahu soal perkembangan desa wisata.
- 2) Keterbatasan transparansi informasi, khususnya dari pihak pengelola seperti Pokdarwis terhadap masyarakat luas.
- 3) Infrastruktur dan aksesibilitas menuju lokasi wisata yang belum memadai, turut menurunkan minat kunjungan dan partisipasi pengembangan.
- 4) Belum adanya *MoU* atau keterlibatan formal dari BUMDes, meskipun pihaknya sudah siap untuk berpartisipasi.
- 5) Ketergantungan terhadap peran pemerintah desa, sementara Pokdarwis dan masyarakat belum memiliki peran yang setara dan terstruktur dalam pengambilan keputusan

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan atas hasil analisis informasi yang diperoleh dari wawancara, masih ditemukan beberapa kendala yang menghambat keberlangsungan kemitraan dalam pengembangan Desa Wisata Limbasari. Maka dari itu, demi memperbaiki kemitraan yang terjalin pada pihak yang terlibat perlu dilakukan aksi atau kegiatan berupa:

- 1) Memfasilitasi pembentukan kerja sama formal antara Pokdarwis, pemerintah desa, dan BUMDes, agar peran kelembagaan BUMDes dapat terintegrasi secara langsung dalam pengelolaan desa wisata.
- 2) Membangun sistem komunikasi dan koordinasi yang terstruktur, misalnya melalui forum rutin antar stakeholder dan pemanfaatan media komunikasi desa, guna meningkatkan transparansi dan kejelasan informasi.
- 3) Meningkatkan pelibatan masyarakat secara menyeluruh, tidak hanya dalam pelaksanaan kegiatan wisata tetapi juga dalam perencanaan dan evaluasi, agar tumbuh rasa memiliki dan tanggung jawab bersama.
- 4) Mengoptimalkan peran masing-masing stakeholder sesuai kapasitasnya dengan tetap menjaga prinsip kesetaraan, saling menguntungkan, dan transparansi dalam setiap kegiatan kemitraan.
- 5) Melanjutkan komitmen yang sudah terbentuk ke dalam sistem kelembagaan yang berkelanjutan, sehingga kemitraan tidak hanya berjalan sementara tetapi menjadi bagian dari tata kelola desa yang konsisten.